

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SURAKARTA**

Oleh

Maulia Junyka Widyawati¹, Ismunawan²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Sukoharjo

Email: ¹mauliajunyka@gmail.com, ²wanismu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini tujuannya mengetahui dan melakukan uji pengaruh Sistem Pengawasan Keuangan, Pengendalian Internal, Kualitas SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Surakarta. Metode kuantitatif dipergunakan pada penelitian ini yakni menerapkam serta data yang didapat dianalisa mempergunakan teknik analisis regresi linier berganda berbantuan SPSS versi 21. Populasinya yaitu semua SKPD di Kota Surakarta sebanyak 36 SKPD dengan jumlah pegawai 5.606. Sampel yang dipakai sejumlah 72 responden dengan memilih subjek mempergunakan metode purposive sampling meliputi pegawai bagian penatausahaan keuangan/akuntansi dan kepala subbagian keuangan. Hasil penelitian secara bersamaan Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas SDM dan Pengawasan Keuangan memberi pengaruh pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Surakarta. Secara individual bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan memberi pengaruh pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Surakarta, sementara tidak ada pengaruh Kualitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Surakarta.

Kata Kunci: Kualitas Informasi, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap good governance (pemerintahan yang baik) menuntut pemerintah daerah ataupun pusat agar menjalankan akuntabilitas publik. Akuntabilitas bisa didefinisikan sebagai suatu pertanggungjawaban atas berhasil tidaknya penerapan misi organisasi dalam memenuhi akuntabilitas yang dilakukan secara berkala.

Harus terdapat empat karakteristik dalam laporan keuangan pemerintah yang bisa mencapai mutu yang diinginkan yakni relevansi, reliabilitas, komparabilitas serta bisa dimengerti. Untuk memastikan kualitas laporan keuangan bisa ditinjau dari hasil laporannya yang menyajikan informasi yang baik serta menunjukkan konsep mutu informasi pada laporan keuangan. Mutu informasi yang ada pada laporan keuangan

akan ditingkatkan oleh kualitas laporan keuangan, sehingga pemakai laporannya bisa yakin untuk mmebuat kebijakan sebab dilandaskan pada informasi yang disusun secara baik, dikoreksi, diaudit dan disetujui secara transparan serta bisa diperhitungkan. Suatu bentuk tanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi negara ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemda serta UU No. 17 Tahun 2003 terkait Keuangan Negara. Laporan yang dihasilkan harus memenuhi SAP berlandaskan PP no. 71 tahun 2010.

Selanjutnya, laporan keuangan pemerintahan diberikan kepada masyarakat umum dan DPR/DPRD sesudah diverifikasi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Terdapat unsur laporan keuangan yang ditampilan yakni mencakup LRA, Neraca, LAK dan CaLK.

Banyak penelitian yang dilaksanakan berhubungan dengan sejumlah faktor yang memberi pengaruh pada kualitas informasi laporan keuangan, misalnya pada penelitian Muflihah, Evi malia, Aminatuz Zakhra (2018) menyimpulkan bahwa SDM, Pengawasan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Nilai informasi, Teknologi Informasi memberi pengaruh pada kualitas informasi laporan keuangan perda. Rizki Afri Mulia (2018) menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern, SDM memberi pengaruh pada kualitas informasi laporan keuangan pemda. Fedrik Laitera, N. Ahuluheluw, M. Fadila Laitupa (2021) menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi SDM, Sistem Akuntansi Keuangan daerah memberi pengaruh pada kualitas informasi laporan keuangan pemda. Rateh Purwaningsih, Ardiansyah Japlani (2021) menyimpulkan bahwa Komitmen Organisasi, Kualitas SDM, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemda. Ramdany, Yusuf Setiawan (2021) menyimpulkan bahwa Implementasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), Pengendalian Internal, Kualitas SDM memberi pengaruh pada mutu informasi laporan keuangan Pemda.

Mutu informasi laporan keuangan akan meningkat dengan adanya pengendalian intern. Pengendalian intern berfungsi untuk melakukan evaluasi secara bebas atas penerapan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah. Kian banyaknya kasus korupsi yang muncul menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak berfungsi dengan baik.

Pengawasan keuangan pun memberi pengaruh ada mutu informasi laporan keuangan. Pengawasan keuangan sangat penting karena adanya peningkatakn kualitas SDM, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akan memaksimalkan kepatuhan dalam pelaksanaan kualitas laporan

keuangan. Sebab, Kualitas Informasi diberi pengaruh oleh pengawasan Keuangan.

Kualitas SDM juga termasuk faktor lainnya yang memberi pengaruh pada mutu informasi laporan keuangan pemda. SDM dengan tingkat kecakapan akuntansi akan mempunyai peranan penting dalam membentuk laporan keuangan yang mempunyai kualitas.

Penggunaan teknologi informasi termasuk hal lain yang berpengaruh pada kualitas informasinya. Teknologi informasi telah menjadi prioritas dalam penciptaan sistem informasi bagi organisasi yang kuat serta dapat menghasilkan keunggulan kompetitif di tengah ketatnya persaingan ini. Kini, melalui kemajuan teknologi, instansi pemerintah telah beralih ke sistem komputer dari sistem manual. Tetapi yang menjadi hambatan penggunaan teknologi informasi ialah kondisi perangkat lunak, perangkat keras, keterbatasan dana, pemutakhiran data dan kondisi SDM. Hambatan ini yang dapat menjadi faktor belum optimalnya pemakaian teknologi informasi di organisasi pemerintah.

Kualitas informasi laporan keuangan daerah yang buruk memungkinkan terjadinya kesalahan dan penyimpangan di bidang keuangan, terbukti dengan beberapa pejabat yang terlibat dalam tuntutan hukum yang bisa menyebabkan kerugian daerah ataupun negara. Buruknya administrasi keuangan berlangsung berulang kali. tentunya yang akan mendapat dampaknya ialah masyarakat. Hal tersebut pun mengakibatkan biaya transaksi yang tinggi, ekonomi biaya tinggi, mempercepat kerusakan fasilitas publik, serta layanan yang buruk kepada publik. Fenomena ini menyebabkan ketimpangan antara kenyataan dan harapan. Harapannya, dengan perbaikan peraturan dan memperoleh informasi laporan keuangan yang bermutu, meningkatkan mutu SDM dibidang manajemen keuangan daerah.

Penyajian dan penyampaian laporan keuangan menjadi otoritas daerah di Indonesia menarik untuk diteliti, sebab kenyataan di

lapangan membuktikan masih sering terjadi pelanggaran dari BPK. Berlandaskan data ICW, pada tahun 2020 ada 1.218 kasus korupsi yang disidangkan di Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasar data tersebut terlihat bahwa praktik korupsi paling banyak diadakan oleh ASN sejumlah 321 kasus, oleh aparat desa sebanyak 330 kasus dan oleh pihak swasta sebanyak 286 kasus. Sehingga, diperlukan Sistem pengendalian Internal yang berkualitas, Pengawasan keuangan yang baik, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas SDM agar penyimpangan – penyimpangan tersebut dapat diminimalisir.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Mardiasmo dalam Yunita dan Chirtianingrum (2018: 100) Akuntabilitas Publik ialah kewajiban pemilik kepercayaan menyampaikan pertanggungjawaban, menyediakan dan mengatakan semua aktivitas serta kegiatannya ialah tanggung jawabnya pada prinsip yang mempunyai hak dan wewenang buat mendapatkan pertanggungjawaban.

Permasalahan keagenan timbul saat eksekutif akan lebih meningkatkan keperluan mereka sendiri, dimulai dengan proses penganggaran, memutuskan untuk mengajukan laporan keuangan yang sehat, dan menunjukkan bahwa operasi mereka sehat dan aman, posisi mereka di mata rakyat dan legislatif. Teori ini pun mengungkapkan bahwa agen sifatnya oportunistis serta lebih menghindari risiko. Sebagai manajer, Pemerintah Daerah memegang tanggung jawab untuk menyediakan laporan keuangan yang lengkap dan andal, serta menyediakannya bagi pengguna. Pemerintahan Daerah yang bertindak sebagai agen menghindari risiko ketidakpercayaan pemangku kepentingan dalam kegiatan mereka. sehingga, pemerintah daerah akan berupaya menunjukkan bahwa

pekerjaannya baik dan memikul tanggung jawab dalam mengelola administrasi daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah

Termuat dalam PP No. 71 Tahun 2010 terkait perubahan mendasar dari SAP dari kas basis menjadi akuntansi akrual. SAP didasarkan pada akuntansi akrual yang dipergunakan pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Beban, aset, pendapatan, ekuitas, serta kewajiban dalam laporan keuangan disajikan dengan dasar akrual.

Laporan ini dipergunakan dalam menentukan nilai sumber daya ekonomi yang dipergunakan dalam mengevaluasi posisi keuangan, melaksanakan aktivitas pemerintah, serta menilai efisiensi dan efektivitas unit akuntansi, dan memudahkan dalam menetapkan kepatuhan entitas terhadap peraturan undang-undang. Laporan keuangan Pemerintah mencakup LPE, LRA, LPSAL, LO, CaLK, dan Laporan Arus Kas (LAK). Neraca,

Akuntansi sektor publik yaitu tahap pengukuran, pengidentifikasi, pelaporan serta pencatatan transaksi keuangan dari entitas Pemda untuk pembuatan keputusan ekonomi yg dibutuhkan pihak luar (Dwi Ratmono: 2015)

Khasmir (2016:66) Laporan keuangan adalah alat yang dipakai dalam mendapat informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan pada neraca dan hasil operasi yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu (laporan laba rugi). Data keuangan akan lebih bermakna bagi pemangku kepentingan jika dibandingkan dan dianalisis selama dua periode waktu atau lebih untuk membantu pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemilik usaha atas kepercayaannya terhadap pengelolaan aset perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan, manajemen mempelajari posisi keuangan, peristiwa dan hasil kegiatan perusahaan di masa lalu. Hasil

ini dapat mengungkapkan kelemahan dan apa yang dianggap baik.

Pengendalian Internal

(Budiawan 2014:24) Sistem ini termasuk fondasi paling kokoh dari tata pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian intern adalah sarana untuk memberikan arahan, memantau, serta menilai sumber daya organisasi, termasuk hasil penelaahan oleh Komite Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kecuali dalam hal WDP, WTP tidak memenuhi syarat juga tidak memberi pendapat guna meraih banyak tujuan. Tujuan ini ialah guna memastikan keandalan data keuangan dan laporan keuangan, memeriksa kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, memberikan fasilitas promosi efektivitas dan efisiensi operasi pemerintah, juga memastikan keamanan properti pemerintah. Kelemahan dalam sistem akuntansi menyebabkan lemahnya pengendalian internal, yang pada akhirnya berarti laporan keuangan yang dibentuk semakin tidak relevan dengan pengambilan kebijakan.

Pengawasan Keuangan

Ulum (2009:137) memaparkan bahwa Pengawasan dalam rangka mempertanggungjawabkan keuangan negara diadakan oleh badan pengawas keuangan yang ketentuannya diatur dalam UU pasal 23 butir (5) UUD 1945, yang hasilnya disampaikan kepada DPR. Pengawasan terhadap segala aktivitas pemerintahan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri, salah satunya keputusan kepala daerah sebagai konsekuensi mutlak dari negara kesatuan. Sebagai bagian dari pengawasan, pemerintah membentuk perangkat di lingkungan pemerintah, yaitu APIP.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Rivai dan Sagala (2009:1) SDM sebagai sebuah bidang manajemen umum yang

mencakup aspek pengorganisasian, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan. Tahapan ini termasuk dalam fungsi pemasaran, keuangan, produksi, serta sumber daya manusia atau bidang sebagai SDM dinilai kian penting untuk meraih tujuan perusahaan, sehingga secara sistematis beberapa pengalaman serta hasil penelitian di bidang SDM dikumpulkan, yang dikenal sebagai manajemen SDM. Istilah "manajemen" berarti himpunan pengetahuan mengenai bagaimana memanfaatkan SDM.

Menurut Zuliatri (2012) Kualitas SDM yakni keterampilan individu di sebuah sistem ataupun organisasi guna menjalankan fungsi maupun kekuasaannya agar meraih tujuannya secara efisien juga efektif. SDM yang kompeten dan mempunyai kualitas di bidang keuangan (akuntansi) menjadi penyangga utama agar menghasilkan susunan laporan keuangan yang bermutu.

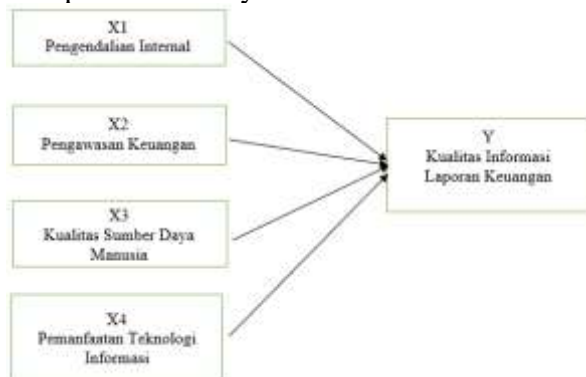
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Darmawan (2014:16) memaparkan bahwa teknologi informasi secara sederhana bisa ditinjau sebagai ilmu yang dibutuhkan dalam mengolah informasi sehingga informasi bisa ditemukan secara akurat dan mudah. Isi dari ilmu tersebut meliputi prosedur dan teknik dalam penyimpanan informasi secara efektif dan efisien.

Sutrabi (2014:3) mengemukakan bahwa Teknologi informasi merupakan sebuah teknologi yang dipakai buat melakukan pengolahan data, seperti memperoleh, memproses, menyimpan, menyusun, memanipulasi data di beberapa cara buat membentuk informasi yang mempunyai kualitas, yakni informasi yang tepat waktu, seksama dan relevan, yang dipergunakan kepentingan pribadi, usaha, juga pemerintahan serta berita yang strategis buat pembuatan kebijakan.

Kerangka Pemikiran dan pengujian hipotesis

Berikut ini ialah kerangka pemikiran dari penelitian ini yakni:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Berlandaskan penelitian oleh Rateh Purwaningsih, Ardiansyah Japlani pada tahun 2021 membuktikan bahwa Pengendalian Internal secara positif memberi pengaruh pada laporan keuangan pada tahun 2014 – 2019 berdasarkan metode camel termasuk dalam kategori sehat.

H1: Pengendalian Internal memberi pengaruh bermakna pada kualitas informasi laporan keuangan.

2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Berdasar penelitian yang dilakukan Muflihah, Evi malia, Aminatuz Zakhra pada tahun 2018 menghasilkan bahwa Pengawasan keuangan memberi pengaruh positif berdasarkan metode camel termasuk dalam kategori sehat.

H2: Pengawasan Keuangan memberi pengaruh bermakna pada kualitas informasi laporan keuangan.

3. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Berdasarkan penelitian Ramdany, Yusuf Setiawan pada tahun 2021 membuktikan bahwa Kualitas SDM secara

positif memberi pengaruh pada kualitas informasi laporan keuangan pada tahun 2014 – 2019 berdasarkan metode camel termasuk dalam kategori sehat.

H3: Kualitas SDM memberi pengaruh bermakna pada kualitas informasi laporan keuangan.

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Berdasarkan penelitian oleh Fedrik Laitera, N. Ahuluheluw, M. Fadila Laitupa pada tahun 2021 memperlihatkan bahwa secara positif Pemanfaatan Teknologi informasi memberi pengaruh pada kualitas informasi laporan keuangan pada tahun 2014 – 2019 berdasarkan metode camel termasuk dalam kategori sehat.

H4: Pemanfaatan Teknologi informasi memberi pengaruh pada kualitas informasi laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan pada penelitian ini ialah metode kuantitatif. Pemaparan (Kasiram 2008) bahwa penelitian kuantitatif sebagai sebuah tahap memperoleh pengetahuan yang memanfaatkan data berbentuk angka yang menjadi alat untuk menganalisa keterangan mengenai apa yang hendak dipahami. Metode ini dapat menganti data menjadi bilangan guna menganalisa hasilnya. Penelitian kuantitatif sifatnya bisa asosiatif, berkorelasi, dan deskriptif tergantung pada korelasi antar variabel. Jenis penelitian ini umumnya hanya menilai sejauh mana satu variabel dalam suatu sampel ataupun populasi, sedangkan analisis korelasi dan asosiasi mengkaji korelasi antara dua atau lebih variabel.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mempergunakan metode penghimpunan berupa Koesioner dengan skala likert. Sugiyono (2012:93) mengerangkan bahwa skala likert ialah Skala yang dipakai dalam menilai perilaku responden juga melihat

pendapat sekelompok orang atau seseorang, guna memberikan jawaban yang akurat atas kejadian sosial yang diteliti. Skala Likert yang dipakai yaitu 2 = Tidak Setuju (TS), skor point 3 = Netral (N), 1 = STS, 4 = Setuju (S), 5 = SS (Sangat Setuju).

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi ialah daerah generalisasi yang mencakup objek subjek dan dengan ciri dan kuantitas tertentu yang peneliti tentukan buat dipahami serta lalu disimpulkan (Sugiyono, 2016:135). Populasi pada penelitian ini ialah Seluruh pejabat struktural atau pengelola unit kerja pada SKPD di Kota Surakarta. SKPD yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Kota Surakarta sejumlah 36 SKPD dengan jumlah pegawai 5.606 orang.

Sampel ialah bagian berasal jumlah serta ciri yang dipunyai oleh populasi tadi. Jika populasi besar, penelitian tak dapat memahami seluruh yang terdapat pada populasi, contohnya kurangnya dana, energi serta waktu, maka penelitian bisa memakai sampel dari populasi (Sugiyono, 2015:73). Sampel yang digunakan yaitu karyawan yang terlibat dalam Laporan Keuangan. Di setiap SKPD yang bersangkutan dengan Laporan Keuangan yaitu 2 karyawan. Jadi banyak sampel pada penelitian yaitu 72 responden.

Teknik dalam pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling*. Teknik ini sebagai teknik pemilihan sampel menggunakan kriteria tertentu (Sugiyono, 2016:85). Ketentuan sampel yang dipergunakan pada penelitian ialah pegawai bagian penatausahaan keuangan/akuntansi.

Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel

1. Pengendalian Internal

Menurut Budiawan (2014:24) Pengendalian Internal merupakan salah satu fondasi paling kokoh dari tata pemerintahan yang baik. Pengendalian Internal yaitu sarana untuk mengarahkan, memantau, mengukur dan mengukur sumber daya dari suatu organisasi.

Menurut PP No. 60 tahun 2008 Variable ini dapat di ukur menggunakan 4 indikator yakni:

- a. Penilaian Resiko.
- b. Lingkungan Pengendalian.
- c. Informasi dan Komunikasi.
- d. Kegiatan Pengendalian.

2. Pengawasan Keuangan

Yaitu segala aktivitas pemerintah daerah untuk penerapan otonomi daerah yang menjadi akibat mutlak dari negara kesatuan. Sebagai bagian dari pengawasan, pemerintahan membuat perangkat di kalangan pemerintah yaitu APIP.

Berlandaskan (ulum, 2009:137) pengukuran variable ini menggunakan 3 pertanyaan dengan indikator sebagai berikut:

- a. Merencanakan desain sistem umpan balik.
- b. Guna membandingkan performa sebenarnya dengan standar yang ada.
- c. Guna Mengatur deviasi.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas ini ialah potensi untuk melakukan fungsi-fungsi untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan daerah membutuhkan SDM yang mempunyai kualitas.

Menurut (Notoatmodjo, 2003 dalam Mansur, 2017), pengukuran variable ini bisa mempergunakan 3 pertanyaan dengan indikator sebagai berikut:

- a. Pengalaman: Pengalaman yang diperlukan dalam menetapkan prestasi dan spesifikasi pekerjaan.
- b. Pendidikan: Pendidikan dibagi menjadi 2 yaitu pendidikan non formal dan pendidikan formal.
- c. Pelatihan: Pelatihan yang tepat, Pelatihan yang disediakan untuk tenaga ahli materi dan Pelatihnannya selaras dengan keperluan pengguna

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Kadir (2003:12), hal ini merupakan kecepatan pengolahan informasi dan kemampuan penggunaannya secara luas, bisa memberikan kesempatan untuk beberapa

pihak untuk mengelola, mengakses juga menggunakan informasi keuangan secara akurat dan cepat.

Berdasarkan PP No.56 Tahun 2005, pengukuran variable ini mempergunakan indikator berikut ini:

- a. Kecepatan
- b. Integritas
- c. Keandalan
5. Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Yakni alat untuk mendapat data terkait kondisi keuangan pada neraca (tanggal tertentu) dengan hasil yang diperoleh perusahaan untuk periode tertentu (laporan laba rugi) tindakan bisnis).

Berlandaskan PP No. 71 Tahun 2010 terkait SAP bahwa ciri kualitatif laporan keuangan yakni laporan yang sesuai syarat normatif untuk meraih tujuannya. Variable ini bisa diukur mempergunakan indikator di bawah :

- a. Andal
- b. Relevan
- c. Bisa dipahami
- d. Bisa dibandingkan

Alat Analisis Data

1. Uji Instrumen Data

- Uji Validitas

Yakni dengan menghubungkan antara nilai indikator dengan jumlah nilai konstruk. Jika hubungan tersebut membuktikan hasil yang signifikan, bisa dibuat kesimpulan bahwa indikator pertanyaan ialah valid (Ghozali, 2011).

- Uji Realibilitas

Menurut Nunally (1994) Uji reliabilitas yaitu sebuah angket yang dapat dipercaya ataupun dianggap reliabel bila respon individu atas sebuah pernyataan stabil atau konsisten tiap waktunya. Sebuah variabel dianggap reliabel bila mempunyai skor Cronbach's Alpha > 0,60 (Ghozali, 2011).

2. Pengujian Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

Uji ini dipakai dalam melakukan uji sebuah regresi apakah nilai kesalahan yang

telah memberi sumbangan normal ataukah tidak (Suliyanto, 2011).

- Uji Multikolinearitas

Uji ini tujuannya melakukan uji suatu model regresi apakah terdapat hubungan antar variabel bebas (Ghozali, 2018, p. 105).

- Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas yaitu Model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas bisa setiap variabel independen tidak memberi pengaruh signifikan pada absolut residual ($\alpha = 0.05$) (Sanusi, 2013).

3. Pengujian Regresi Berganda

Pemaparan (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2011) mengenai analisis regresi linier berganda yakni studi terkait hubungan variabel tergantung dengan satu maupun lebih variable bebas, tujuannya agar memprediksi dan mengestimasi rerata populasi maupun skor rerata variable tergantung sesuai dengan skor variabel bebas yang ada.

Penelitian ini melaukan pengolahan data secara komputerisasi mempergunakan SPSS versi 19.0 untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat serta pengolahan data yang lebih akurat dan cepat, memudahkan dalam pengolahannya. Hipotesis ataupun angket amat bergantung pada mutu data yang dipakai pada uji coba tersebut. Bila instrumen yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian tidak terlalu valid dan reliabel, maka data penelitian tidak akan bermanfaat. Untuk pengujian hipotesis, metode analisisnya ialah Multiple Regression menggunakan persamaan regresi di bawah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dimana:

X1 = Pengendalian Internal

X3 = Kualitas SDM

Y = Kualitas Informasi Laporan Keuangan

α = Nilai konstanta

X2 = Pengawasan Keuangan

ε = Error/ Tingkat kesalahan

X4 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

4. Pengujian Hipotesis

- Uji t ini dipergunakan dalam melakukan uji hipotesis penelitian (Sanusi, 2013).
- Uji F (Uji Simultan), pada hakikatnya uji ini membuktikan apakah setiap variabel bebas yang ditambahkan ke dalam model mmeberi pengaruh pada secara bersamaan pada variabel tergantung (Ghozali, 2011).
- Koefisien determinasi (R²) menilai sejauh mana daya model dalam menjelaskan variasi variabel bebas atau tergantung (Ghozali, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Regresi Linier Berganda

Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardize d	Coefficients		Standardize d	t	Sig
		B	Std. Error			
(Constant)	-3.769	2.405			-1.567	.122
Total Sistem Pengendalian Internal	.891	.068	.814	13.131	.000	
Total Pengawasan Keuangan	.172	.086	.138	2.011	.048	
Total Kualitas SDM	.034	.048	.043	.702	.485	
Total Pemanfaatan Teknologi	.058	.085	.047	.679	.499	

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2021

Berlandaskan hasil uji regresi linier berganda yang dikerjakan, sehingga bisa ditambahkan ke persamaan linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$Y = -3.769 + 0,891X_1 + 0,172X_2 + 0,034X_3 + 0,058X_4$$

Uji Instrumen Data

- Uji Validitas

Hasil Uji Validitas

Variabel	Kisaran Korelasi	Sig	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	0,325** - 0,605**	0,00	Valid
Pengawasan Keuangan	0,425** - 0,597**	0,00	Valid
Kualitas SDM	0,543** - 0,698**	0,00	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,523** - 0,615**	0,00	Valid
Kualitas Informasi Laporan Keuangan	0,652** - 0,7255**	0,00	Valid

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2021

• Uji Reabilitas

Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	0,617	0,60	Reliabel
Pengawasan Keuangan	0,610	0,60	Reliabel
Kualitas SDM	0,737	0,60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,628	0,60	Reliabel
Kualitas Informasi Laporan Keuangan	0,737	0,60	Reliabel

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2021

Berlandaskan hasil uji Validitas bahwa tiap indikator pernyataan pada angket dianggap valid dan berdasarkan uji reabilitas dapat diketahui bahwa setiap indikator pernyataan kuesioner dinyatakan reliabel, sebab pada semua variabel mmeberi angka Cronbach's Alpha >0,60.

Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
Most Extreme Differences	Std. Deviation	.95766188
	Absolute	.111
	Positive	.073
	Negative	-.111
Kolmogorov-Smirnov Z		.942
Asymp. Sig. (2-tailed)		.338

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2021

Berdasar tabel tersebut, angka Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0,338 maupun melebihi 0,05 maka data memberi distribusi normal.

- Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Total Sistem Pengendalian Internal	.743	1.346
Total Pengawasan Keuangan	.609	1.643
Total Kualitas SDM	.747	1.340
Total Pemanfaatan Teknologi	.602	1.662

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2021

Pada tabel hasil ujinya didapat bahwa skor Tolerance setiap variabel >0,10 serta skor VIF masing-masing variabel <10 maka kesimpulannya tidak mengalami multikolinearitas.

• Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardize	Coefficients	Standardize	t	Sig.
		d		d		
(Constant)	B	Std. Error	Beta			
Total Sistem Pengendalian Internal						
Total Pengawasan Keuangan						
Total Kualitas SDM						
Total Pemanfaatan Teknologi						

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2021

Berdasarkan nilai signifikansi pada tabel Coefficients dilihat bahwa nilai Sig untuk Total Sistem Pengendalian Internal yaitu 0,303, lalu nilai Sig untuk Total Pengawasan Keuangan yaitu 0,760, kemudian nilai Sig untuk Total Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu 0,091 serta nilai Sig untuk Total Pemanfaatan Teknologi yaitu 0,165, maka bisa disimpulkan tidak terdapat Heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

• Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardize	Coefficients	Standardize	t	Sig.
		d		d		
(Constant)	B	Std. Error	Beta			
Total Sistem Pengendalian Internal						
Total Pengawasan Keuangan						
Total Kualitas SDM						
Total Pemanfaatan Teknologi						

a. Dependent Variable:
KUALITASINFORMASI_LK

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2021

• Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	275.496	4	68.874	70.868	.000*
Residual	65.115	67	.972		
Total	340.611	71			

a. Predictors: (Constant), PEMANFAATAN_TI, KUALITAS_SDM, PENGENDALIAN_INTERNAL, PENGAWASAN_KEUANGAN

b. Dependent Variable:
KUALITASINFORMASI_LK

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2021

Berdasarkan tabel ANOVA yaitu pada kolom Sig. (Signifikansi) terlihat bahwa nilainya di bawah 0,05 yaitu 0,000 atau signifikansi yang berarti bahwa:

1. Model Regresi antara satu variabel tergantung dan empat variabel bebas tersebut adalah baik.
2. Empat Variabel bebas tersebut secara bersamaan memberi pengaruh pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda.

• Koefisien determinasi (R²) atau uji R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.899 ^a	.809	.797	.986

a. Predictors: (Constant), PEMANFAATAN_TI, KUALITAS_SDM, PENGENDALIAN_INTERNAL, PENGAWASAN_KEUANGAN

b. Dependent Variable:
KUALITASINFORMASI_LK

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2021

Berdasarkan tabel Model Summary yang menunjukkan kontribusi variabel bebas pada variabel tergantung bisa diketahui dari R² yang disesuaikan (Adjusted R Square). Terlihat skor koefisien determinasi senilai 0,797 berarti seluruh variabel bebas signifikan secara bersamaan memberi pengaruh pada variabel tergantung yakni Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah senilai 79,7% sisanya 20,3% dipengaruhi oleh faktor lainnya

Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah signifikan karena dengan skor 0,000 berarti di bawah 0,05 maka Kualitas Informasi Laporan

Keuangan Pemda tidak dipengaruhi Sistem Pengendalian Internal secara individual.

2. Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda signifikan karena dengan nilai 0,048 berarti di bawah 0,05, maka secara individual Sistem Pengawasan Keuangan memberi pengaruh pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda.
3. Tidak terdapat pengaruh bermakna Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena dengan nilai 0,499 berarti melebihi 0,05 maka Pemanfaatan Teknologi secara individual memberi pengaruh pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan.
4. Tidak terdapat pengaruh bermakna Kualitas SDM terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena dengan skor 0,485 berarti melebihi 0,05 maka Kualitas SDM secara individual memberi pengaruh pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda.

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan memberi pengaruh bermakna pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Surakarta sementara tidak ada pengaruh Kualitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Surakarta.

Keterbatasan pada penelitian ini hanya sedikit mempergunakan sampel dan populasi, yakni 72 orang di pemerintahan daerah Kota Surakarta. Sehingga, peneliti memberi saran supaya dalam penelitian berikutnya bisa memasukkan variabel lainnya yang bisa memberi pengaruh pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] (Laporan & Pemerintah, 2018) *Lengkap! 7+ Pengertian Sampel Menurut Para Ahli & Pakar*. (n.d.). Retrieved January 6, 2022, from <https://trifaris.net/pengertian-sampel-menurut-para-ahli/>
- [2] Akuntansi, J., & Mempengaruhi, A. F. Y. (2021). *p-ISSN (2301-4075) e-ISSN (2716-3849)*. 10(1), 148–164.
- [3] *Badan Pusat Statistik Kota Surakarta*. (n.d.). Retrieved January 6, 2022, from <https://surakartakota.bps.go.id/indicator/101/302/1/jumlah-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kota-surakarta-menurut-dinas-instansi-pemerintah-dan-jenis-kelamin-di-kota-surakarta.html>
- [4] Budiawan (2014:24), *pengertian pengendalian internal*
- [5] Darmawan (2014:16), *teknologi informasi*
- [6] Dwi Ratmono (2015), *pengertian akuntabilitas sektor publik*
- [7] Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2011, *pengertian analisis regresi linier berganda*
- [8] Ghozali, 2018, p. 105, *pengertian uji Multikolinearitas*
- [9] Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta
- [10] Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- [11] Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- [12] Kadir (2003:12), *pengertian pemanfaatan teknologi informasi*
- [13] Kasiram (2008), *pengertian metode kuantitatif*
- [14] Kasus, S., Pr, P., Jaya, K. N., & Kediri, S. (2013). *No Title*. 1(1), 29–37.
- [15] Khasmir (2016:66), *pengertian laporan keuangan*

- [16] Keuangan, K. L., & Daerah, P. (2018). *Jurnal El-Riyasah, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2018 Rizki*. 9, 7–21.
- [17] Laporan, K., & Pemerintah, K. (2018). *No Title*.
- [18] Malia, E. (2018). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Muflahah. Sinema*, 97–109.
- [19] Mardiasmo (2018:100), *pengertian akuntabilitas publik*
- [20] Notoatmodjo, 2003 dalam Mansur, 2017, *pengukuran variabel kualitas sumber daya manusia*
- [21] *No Title*. (2021). 1(3), 679–686.
- [22] *Populasi Adalah Seluruh Subjek Penelitian. Dan Sampel Adalah Sebagian*. (n.d.). Retrieved January 6, 2022, from <https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html>
- [23] PP No. 60 tahun 2008, *tentang pengukuran variabel pengendalian internal*
- [24] PP No.56 Tahun 2005, *tentang pengukuran variabel pemanfaatan teknologi informasi*
- [25] Rivai dan Sagala (2009:1), *pengertian sumber daya manusia*
- [26] Sanusi (2013), *pengertian uji Heteroskedastisitas*
- [27] Sugiyono (2016:85), *pengertian metode purposive sampling*
- [28] Suliyanto (2011), *pengertian uji normalitas*
- [29] Sutrabu (2014:3), *pengertian teknologi informasi*
- [30] Retrieved January 6, 2022, from https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah
- [31] Ulum (2009:137), *pengawasan keuangan daerah*
- [32] ulum (2009:137), *pengukuran variabel pengawasan keuangan*
- [33] (Akuntansi & Mempengaruhi, 2021; Kasus et al., 2013; Keuangan & Daerah, 2018; Laitera et al., 2021; Laporan & Pemerintah, 2018; Malia, 2018; *No Title*, 2021)
- [34] Zuliatrri (2012), *pengertian kualitas sumber daya manusia*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN